

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan iklim demokrasi untuk peningkatan masyarakat madani yang terbebas dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal-hal yang mendasari dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga UU Nomor 32 Tahun 2004 memberi makna otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota. Meningkatkan kemandirian memberi arti bahwa suatu usaha untuk membiayai, merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaannya ternyata lebih banyak mengalami kendala serta jauh dari tujuan dan harapan yang diinginkan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak daerah tingkat II yang belum mampu untuk mengatur dan mengurus rumah

tangga sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Kaho (1995: 9) yang menyatakan bahwa kenyataan membuktikan bahwa perwujudan cita-cita desentralisasi masih jauh dalam realisasinya. Otonomi daerah masih lebih sebagai harapan ketimbang sebagai kenyataan yang telah terjadi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa otonomi daerah belumlah sebagaimana harapan.

Selama ini ketidakmampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab sebagaimana dikemukakan oleh Hadi (1996: 35-36) yang menegaskan bahwa tingkat kemampuan daerah masih jauh dari yang diharapkan, yang terutama kemampuan keuangan daerah selama ini masih cenderung tergantung pada pemerintah pusat. Pada umumnya kondisi keuangan daerah masih relatif belum mandiri dan masih relatif tergantung pada bantuan dan subsidi anggaran dari pemerintah pusat.

Dengan demikian dalam pelaksanaan pembangunan daerah selain diperlukan adanya prakarsa dan partisipasi aktif masyarakat di daerah, dan juga sangat diperlukan adanya dukungan dari segi kemampuan keuangan. Kemampuan pendapatan asli daerah dapat diterbitkan melalui pemungutan sumber-sumber keuangan khususnya pendapatan asli daerah secara lebih insentif, wajar, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor personil dan peralatan adalah faktor lain yang dapat dikatakan sebagai penunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara berhasil guna dan berdaya guna. Walaupun kondisi keuangan daerah mandiri dan memadai, dimana kegiatan pemerintahan dan pembangunan telah dapat

dipenuhi dari sumber pendapatan asli daerah, namun bilamana sikap, mental dan kualitas aparatur/personilnya masih rendah dan peralatan yang ada tidak dimanfaatkan secara optimal akan berdampak pada daya guna dan hasil guna penyelenggaraan otonomi di daerah.

Berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah diperoleh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah sebagai sumber penerimaan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik baiknya, maka diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber keuangannya. Sebagai konsekuensi logis penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah, maka daerah untuk mencari inovasi, kiat-kiat ataupun terobosan baru dalam menggali dan meningkatkan pemasukan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor pendapatan asli daerah sebagai upaya terciptanya kemandirian daerah dalam pembiayaan urusan rumah tangganya. Sehingga diperlukan adanya kesiapan dari pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan oleh Kaho (1995: 10) yang menyatakan bahwa kesiapan daerah dalam hal keuangan, personalia, kemampuan manajemen dan sarana prasarana adalah faktor penting yang harus diperhatikan supaya otonomi daerah menghasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah akan lebih berhasil guna dengan penyelenggaraan otonomi daerah dengan kemandirian daerah dalam pembiayaan urusan rumah tangganya, sebagaimana yang dijelaskan oleh

Basah dalam A. Manan (1994: 215) berpendapat bahwa mustahil otonomi daerah dapat berjalan dengan sempurna sebagai otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab tanpa disertai kepercayaan.

Dengan demikian secara esensial penyelenggaraan otonomi daerah harus didukung oleh kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah menjadi sangat penting guna menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengkaji sumber sumber penerimaan keuangan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah ::

Bagaimanakah peranan pendapatan asli daerah Kabupaten Sampang dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah?

## **1.3 Maksud dan/atau Tujuan Penelitian**

Maksud dan/atau tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sampang dalam rangka mengoptimalisasi kemampuan pendapatan asli daerah guna mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Untuk mengetahui sumber-sumber keuangan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Sampang sebagai sumber pendapatan.
- c. Untuk mengetahui peranan PAD Kabupaten Sampang dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah sebagai daya dukung penerimaan pendapatan asli daerah.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan masukan pada pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang untuk dijadikan bahan membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan retribusi dan pajak daerah sehingga dapat mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bekal dan pengalaman dalam menganalisa suatu masalah dan berguna untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin meneliti topik yang sama namun dengan masalah dan lokasi yang berbeda.

#### **1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang. Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari masa kerja terhitung dari tanggal 14 Januari 2013 s/d 22 Februari 2013. Adapun pertimbangan memilih lokasi tersebut adalah banyaknya lembaga BUMD di Kabupaten Sampang sehingga menunjang dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.